

Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan

Aminah Nur Habibah¹⁾, Ruslan Abdul Ghofur²⁾, Erike Anggraeni³⁾, Anas Malik⁴⁾

¹Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

^{3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*Email korespondensi: aminahnurhabibah11@gmail.com

Abstract

This research was conducted to find the impact caused by one of the fiscal policy in alleviating poverty. This research was conducted with a qualitative approach to the method of collecting observation, documentation and interview data to the recipient community of the Hope Family Program assistance. The analysis used in this research is descriptive qualitative. The results of the study found that the implementation of the family of hope program in Ketapang District was running in accordance with the goals and objectives of the ministry of social policy in PKH. When viewed from the standpoint of Islamic economics the family hope program in Ketapang District is a positive activity in the welfare of people's lives by meeting the needs of which include Ad-daruriyyah needs, Al-hajjiyyah needs, and At-tahsiniyyah needs and Al-Kamiliyyah needs by not violating Islamic rules and law. Theoretical implications based on the results of the study show that the Family of Hope Program is related to the theory of community needs, which are related to primary needs, secondary needs, tertiary needs and complementary needs. Practical implications, the results of the study have implications for the Ministry of Social Affairs to be able to be careful in selecting PKH recipient communities, so that the assistance falls into the right hands. In the community, with the help of PKH, hopefully it can provide relief for the underprivileged people in meeting their needs in making a living so they can obtain prosperity.

Keywords: Fiscal Policy, Poverty, Family Hope Program

Saran sitasi: Habibah, A. N., Ghofur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 251-258. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014>

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan telah lama menjadi topik perbincangan pemerintah dalam kancah dunia. Kemiskinan mencakup dari kemiskinan regional dan kemiskinan individu yang saling berinteraksi. Kemiskinan regional dipengaruhi oleh sumber daya alam, layanan publik serta pembangunan infrastruktur yang tertinggal dan lingkungan sering mengalami bencana alam. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan individu adalah kondisi kehidupan yang buruk, ketidak mampuan dalam mengembangkan diri, tingkat pendidikan rendah serta pengangguran dan populasi pedesaan yang tinggi. (Zhou, Guo, & Liu, 2019) Kemajuan dari berbagai kebijakan sosial pemerintah yang memiliki inovasi dalam melakukan pengembangan negara telah menarik perhatian mata dunia dengan memahami

keterkaitan antara kebijakan sosial dan pembangunan dengan rezim kesejahteraan. (Plagerson, Patel, Hochfeld, & Ulriksen, 2019)

Kebijakan fiskal memiliki efek terhadap aktivitas ekonomi sebuah pemerintahan. (Bretscher & Hsu, 2016) Seperti halnya negara Indonesia yang memiliki kebijakan fiskal dengan berbagai jenis kebijakan didalamnya sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di bumi pertiwi. Jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun ini dinilai masih cukup tinggi, berikut ini adalah angka kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia

| No | Tahun | Jumlah penduduk Miskin di Indonesia |
|----|-------|-------------------------------------|
| 1 | 2013 | 28.553,93 |
| 2 | 2014 | 27.727,78 |
| 3 | 2015 | 28.513,57 |
| 4 | 2016 | 27.764,32 |
| 5 | 2017 | 26.582,99 |

Sumber : Data Primer Badan Pusat Statistik Diolah tahun 2018

Merujuk pada tabel 1.1 menggambarkan bahwa angka kemiskinan penduduk Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun, bahkan berdasarkan data tabel di atas jumlah penduduk miskin yang ada saat ini menunjukkan kondisi yang pasang surut. Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial (Kementrian Sosial, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009*)

Implementasi PKH di Provinsi Lampung dilaksanakan sejak November 2010 pada propinsi Lampung. Untuk kali pertama pada tahun 2011 Kabupaten Lampung Selatan menjadi daerah pilihan dalam mengimplementasikan PKH dari Kementerian Sosial RI. Kecamatan Ketapang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Ketapang merupakan salah satu Kecamatan yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan terbesar di Propinsi Lampung. Berikut ini adalah data yang menunjukkan mengapa pemerintah melayangkan bantuannya kepada masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :

Tabel 2. Pendapatan Rata-rata Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Berdasarkan Tingkat Pendapatan

| No | Jumlah Penghasilan (Rp/bln) | Jumlah (orang) | |
|----|-----------------------------|----------------|---------|
| | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | < 500.000 | 1.711 | 806 |
| 2 | 500.000-750.000 | 850 | 1.569 |
| 3 | >750.000 | 249 | 435 |
| | Jumlah | 2.810 | 2.810 |

Sumber : Data Primer UPPKH Kec. Ketapang diolah pada Tahun 2018

Mengacu pada data di atas, jumlah pendapatan rata-rata masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sebelum mendapat bantuan Program Keluarga Harapan dapat dikatakan rendah. Dengan pendapatan yang rendah maka akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya seperti halnya tingkat pendidikan dan kesehatan.

Berbeda dengan India, kemiskinan yang terjadi di propinsi Kanada berupaya diatasi dengan strategi pengentasan kemiskinan (PRS). Tujuan dari pemerintah Kanada adalah mengurangi kemiskinan dengan strategi pengentasan kemiskinan dengan pengajuan kredit, keputusan ini mungkin tidak akan berdampak secara langsung namun dengan demikian diharapkan dapat membangun pola yang lebih baik dan memiliki dampak positif dalam jangka waktu yang panjang. (Plante, 2019) Lain dari penelitian sebelumnya tersebut di atas, temuan penelitian ini menjadikan sistem pajak Islam sebagai alasan untuk mengurangi ketimpangan serta kemiskinan yang terjadi pada masing-masing daerah. (Tulus, et. al., 2018) Pengentasan kemiskinan yang terjadi saat ini dapat dilakukan dengan adanya berbagai kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah demi tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan.

Program keluarga harapan merupakan salah satu dari berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang terdapat dibelahan negara republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini, penelitian ini akan membahas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Ekonomi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari masyarakat yang menjadi anggota penerima manfaat PKH serta data perpustakaan dan literatur yang dapat mendukung pengumpulan data dalam penelitian. (Sugiono, 2016) Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Populasi dapat dimaknai sebagai keseluruhan objek/subjek yang dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian. (Arikunto, n.d.) Populasi dalam penelitian ini adalah anggota penerima manfaat PKH Kecamatan Ketapang. Sampel dalam penelitian ini adalah ketua kelompok dari anggota penerima manfaat PKH.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota penerima manfaat PKH, teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. (Sugiono, 2016) Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : Anggota penerima manfaat Kecamatan Ketapang yang aktif dan merupakan ketua kelompok dalam kegiatan usaha bersama.

Sebagai kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode Deduktif. Deduktif yaitu yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan di mulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasional. (Sudjana, 2001)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implemintasi program keluarga harapan dalam mensejahterakan masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan yang berada di Propinsi Lampung. Berdasarkan data dari responden dengan adanya bantuan program keluarga harapan terjadi peningkatan taraf hidup pada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Peningkatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat penerima manfaat PKH.

1) Kondisi Pendapatan Warga Kecamatan Ketapang Sebagai Penerima Manfaat Bantuan PKH

Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan anak warga penerima manfaat PKH, yaitu :

Tabel 3. Pendapatan Rata-rata Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Berdasarkan Tingkat Pendapatan

| No | Jumlah Penghasilan (Rp/bln) | Jumlah (orang) | |
|----|-----------------------------|----------------|---------|
| | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | < 500.000 | 1.711 | 806 |
| 2 | 500.000-750.000 | 850 | 1.569 |
| 3 | >750.000 | 249 | 435 |
| | Jumlah | 2.810 | 2.810 |

Sumber : Data Primer Diolah UPPKH Kec. Ketapang Tahun 2018

Data dari tabel di atas merupakan data pendapatan masyarakat Kecamatan Ketapang dari sebelum dan sesudahnya menjadi anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Data di atas merupakan data tahun 2018 yang ada pada UPPKH Kecamatan Ketapang. Data di atas menunjukkan peningkatan pendapatan yang terjadi pada kondisi perekonomian warga Kecamatan Ketapang yang menjadi lebih baik.

2) Kondisi Lapangan Pekerjaan Warga Penerima Manfaat PKH

Untuk melanjutkan kehidupan masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan agar memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Baik untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan. Berikut ini adalah kondisi lapangan pekerjaan masyarakat warga penerima manfaat PKH yaitu :

Tabel 4. Data Lapangan Pekerjaan Warga Sebelum dan Sesudah Menerima Manfaat PKH

| No | Kondisi Lapangan Pekerjaan | | | |
|----|----------------------------|--------|-----------------|--------|
| | Sebelum | | Sesudah | |
| | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
| 1 | Pedagang | 248 | Pedagang | 400 |
| 2 | Petani | 357 | Petani | 770 |
| 3 | Buruh | 692 | Buruh | 750 |
| 4 | Nelayan | 411 | Nelayan | 496 |
| 5 | Peternak | 122 | Peternak | 250 |
| 6 | Pengangguran | 980 | Pengangguran | 144 |
| | Jumlah | 2.810 | Jumlah | 2.810 |

Sumber: Data Primer Diolah UPPKH Kec. Ketapang Tahun 2019

Data di atas merupakan data lapangan pekerjaan masyarakat Kecamatan Ketapang sebelum dan sesudah menerima bantuan Program Keluarga

Harapan dari Kementrian Sosial. Berdasarkan data di atas sebelum adanya bantuan Program Keluarga Harapan jumlah tingkat pengangguran berada di angka 980 Orang dengan jumlah penduduk Kecamatan Ketapang Sebanyak 2.810. Namun setelah adanya bantuan Program Keluarga Harapan tingkat pengangguran menurun pada angka 144 orang.

3) Kondisi Pendidikan Masyarakat Penerima Bnantuan Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang
Tabel 5. Data pendidikan Anak Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang

| No | Kondisi Pendidikan | Jumlah | |
|----|--------------------|---------|---------|
| | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | Sekolah | 6.313 | 8.912 |
| 2 | Belum Sekolah | 8.021 | 7.121 |
| 3 | Putus Sekolah | 883 | 635 |
| 4 | Tidak Sekolah | 1.002 | 765 |
| | Jumlah | 16.219 | 17.433 |

Sumber : Data Primer Diolah UPPKH Kec. Ketapang Tahun 2018

Tabel di atas merupakan tabel yang berisikan data pendidikan dari anak-anak dengan status orang tua sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang ada pada Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi pendidikan yang tertera di atas merupakan kondisi pendidikan yang ada pada masyarakat dari sebelum dan sesudah menjadi Anggota penerima bantuan PKH. Kodisi pendidikan dengan status bersekolah sesudah menjadi anggota PKH menjadi meningkat. Dan kondisi pendidikan dengan status belum sekolah, putus sekolah dan tidak sekolah menjadi menurun setelah menerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Kementrian sosial.

b. Pembahasan

1) Peran PKH dalam Pengentasan Kemiskinan

Kondisi perekonomian yang dikategorikan miskin merupakan masalah yang bersifat multidimensi. Wrihatnolo berpendapat multi dimensional merupakan sifat kemiskinan dari berbagai aspek, yaitu: Ekonomi, Sosiologis, Antropologis, Kebijakan, Teknologi dan perubahan global. Kondisi yang miskin mempengaruhi pendidikan, kesehatan serta politik dalam suatu negara.

Kemiskinan telah membuat Jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan, keterbatasan sandang, pangan dan papan, tidak ada kesempatan menabung, sulitnya jaminan kesehatan. Miskin telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya *Human Development Index* (HDI) (Samoedra, 2009)

Setiap Negara pasti memiliki masalah masing-masing, tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, salah satu di antaranya adalah bidang social ekonomi seperti masalah kemiskinan. Masyarakat miskin tidak cukup mampu dalam menghadapi perkembangan zaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita Negara. (Dyah Ayu Virgoreta dkk. Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Pada pasal-pasal tersebut di atas menjelaskan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok (*klaster*) kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Pertama, adalah kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kebijakan ini berupa program yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Keluarga Sangat Miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Kedua, adalah kebijakan berjenis pemberdayaan dengan pendekatan yang partisipatif, kegiatan dilakukan berkelompok dengan rencana

pembangunan berkelanjutan. Penerima manfaat merupakan warga miskin. Contohnya PNPM Mandiri.

c. Ketiga, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Yang termasuk dalam katagori ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Purwanto, 2016)

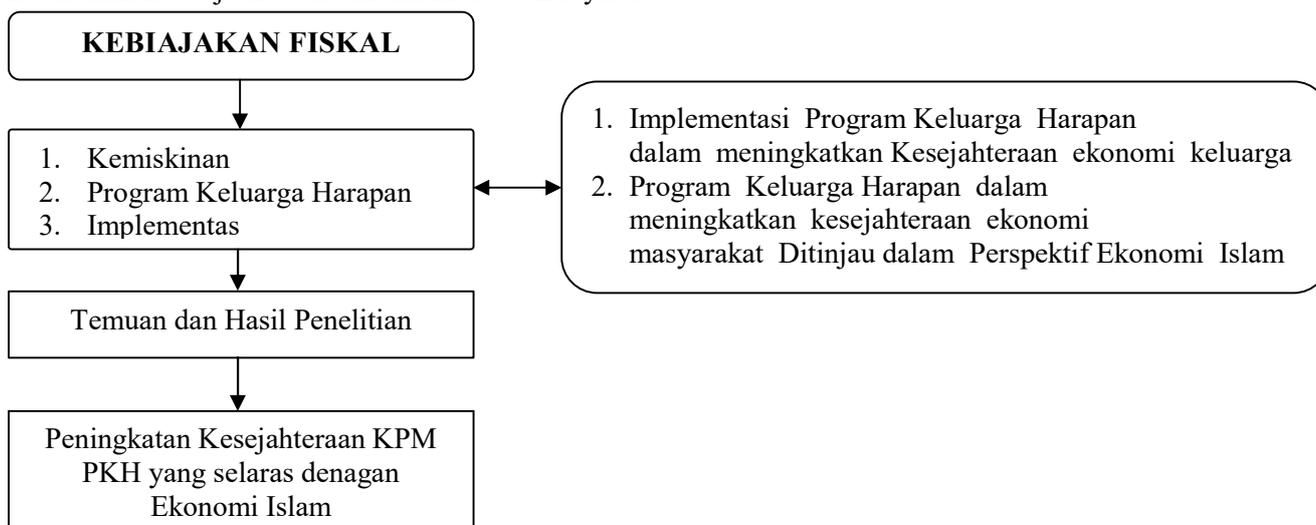
2) Peran Kebijakan Fiskal Dalam Islam Mengentas Kemiskinan

Kebijakan yang dapat dikembangkan dalam rangka mengentas kemiskinan adalah pemberian manfaat bantuan PKH kepada warga (Panduan Umum Program Keluarga Harapan, 2013). Bantuan manfaat PKH merupakan program bantuan bagi masyarakat miskin dalam bentuk bantuan tunai, namun tidak serta merta pemerintah memberikan bantuan tanpa adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Tujuan bantuan manfaat PKH yaitu

mengurangi kemiskinan terutama pada warga pelosok. Kesenambungan dari bantuan ini adalah kontribusi dalam mempercepat pembangunan milenium.

Umumnya bantuan manfaat Keluarga Harapan bertujuan menaikan taraf hidup keluarga miskin dengan syarat pemenuhan kebutuhan dipergunakan untuk kesehatan dan pendidikan. Dengan bantuan yang diberikan besar harapan pemerintah adalah mensejahterakan warga khususnya warga kalangan bawah.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kebijakan fiskal mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu ekonomi untuk keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya itu kembali ditentukan oleh tujua sosial ekonominya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara kebijakan fiskal dalam pengentasan kemiskinan pada Progam Keluarga Sejahtera (PKH) sangat tepat sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini.



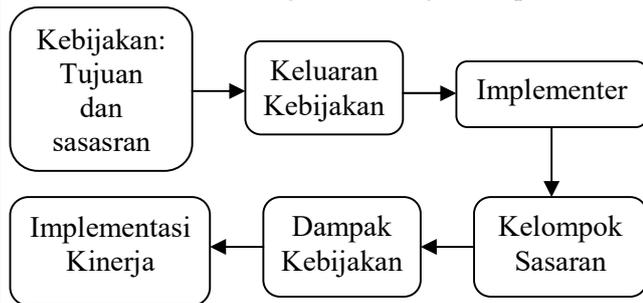
Daniel Menyatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan sosial, dan memahami sebuah kebijakan tersebut merupakan program negara dalam mensejahterakan masyarakat kecil. Mensejahterakan kehidupan masyarakat adalah sumber perlindungan sosial yang sangat potensial. (Daniel, 2018) Adiwarmen Mengungkapkan pembangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid*, *Adl* (keadilan), *Nubuawah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil), kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam termasuk tujuan dari kebijakan fiskal. (Karim, 2001)

Berbeda dengan M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: *Trusteeship ofman*; *Co-operation*; *Limite private property*; dan *State enterprise*. (Muslimin, 2005)

Implementasi kebijakan fiskal dengan pemerataan distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh dengan *buildin program* adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliverpolicy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Berdasarkan paran

tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan fiskal yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. (Purwanto, 2016) Berikut ini adalah implementasi Program PKH:

Gambar 1. Alur Proses Implementasi Kebijakan Fiskal Pada Program Keluarga Harapan



Dalam memahami alur proses implementasi kebijakan fiskal pada Program Keluarga Harapan berikut ini adalah penjabarannya:

| No | Proses kebijakan Fiskal | Output |
|----|-------------------------|---|
| 1 | Tujuan dan sasaran | <p>Penerima Program Keluarga Harapan Adalah Rumah Tangga Miskin yang sesuai dengan Kriteria BPS dan memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan oleh program antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu hamil/ibu nifas/anak balita, Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (prasekolah) SD/MI (usia 7-12 tahun), Anak SLTP/MTs (usia 12-15 tahun), Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan SMA Lanjut usia diatas 70 tahun Disabilitas Berat Sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan diberikan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama ibu atau wanita dewasa. Kartu tersebut. |

| | | |
|---|----------------------|---|
| 2 | Keluaran Kebijakan | Progam Keluarga Harapan |
| 3 | Implementer | <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Sasaran (<i>Targetting</i>) Pertemuan awal dan validasi Pembentukan Kelompok Kelompok Penerima Manfaat Penyaluran Bantuan Verifikasi Komitmen Pemutakhiran Data Kelompok Penerima manfaat. |
| 4 | Dampak Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkat kondisi sosial Rumah Tangga Sangat Miskin Meningkatkan taraf pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, berat, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin |
| | Implementasi Kinerja | Meningkatnya kualitas kesejahteraan, Pendidikan dan Kesehatan Pada Masyarakat |

3) Kesejahteraan Masyarakat dalam Islam

Kesejahteraan mejadi masalah terus-menerus. (Pryce, 2018) Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvesional dalam berbagai sudut pandang. Islam memiliki ajaran yang sangat kompleks, termasuk hubungan manusia dan manusia itu sendiri. Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Komitemen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua sumber daya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan "*maqashidsyari'ah*" diantaranya adalah: Pemenuhan kebutuhan pokok, Sumber daya pendapatan yang terhormat dan Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. (Zaman, 2019)

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kebidupan. Hal ini merupakan

dasar dan tujuan dari syari'ah Islam sendiri yaitu *maslahatal-„ibad* (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus cara untuk mendapatkan *falah* (keberuntungan) yang maksimum kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Hud ayat 6 yang berbunyi:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦﴾

Artinya : “dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberikannya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar Ra'dayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ١١

Artinya : “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan usaha serta campur tangan pihak lain untuk memfasilitasinya. Masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi

dan mengaturberbagainorma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintah”.

Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah bagi masyarakat adalah:

a. Kebutuhan Primer (*Ad-daruriyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat.

b. Kebutuhan Sekunder (*Al-hajjiyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.

c. Kebutuhan Tersier (*At-tahsiniyyah*)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat Kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder, jika kedua kebutuhan itu sudah terpenuhi maka boleh memenuhi kebutuhan tersier.

d. Kebutuhan Komplementer (*Al-Kamiliyyah*)

Suatu kalakebutuhan yang berkaitan erat dengan barang pelengkap adalah kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama untuk melengkapi, sehingga barang tersebut merupakan barang pelengkap. (Ghafur, 2013)

4. KESIMPULAN

Implementasi Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Ketapang berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran, keluaran kebijakan, implementer, kelompok sasaran, dampak kebijakan dan implementasi kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Keberhasilan implementasi program keluarga harapan terwujud dalam peningkatan yang terjadi dari segi aspek tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan anak penerima manfaat PKH Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Indonesia. Kegiatan yang dilakukan Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan positif dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan *Ad-daruriyyah*, kebutuhan *Al-hajjiyyah*, *At-tahsiniyyah* serta kebutuhan *Al-Kamiliyyah* dengan tidak melanggar aturan dan syariat Islam.

Implikasi teoritis berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berkaitan dengan teori kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yang berkaitan dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan kebutuhan komplementer. Implikasi secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi pada Kementerian Sosial untuk dapat cermat dalam memilih masyarakat penerima bantuan PKH, agar bantuan tersebut jatuh pada tangan yang tepat. Pada masyarakat, dengan adanya bantuan PKH semoga dapat memberikan keringan bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan hidup sehingga dapat memperoleh kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (n.d.). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bretscher, L., & Hsu, A. C. (2016). Level and Volatility Shocks to Government Spending: Term Structure Implications. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2838667>
- Daniel, B. (2018). *Varieties of Social Policy by Other Means: Lessons for Comparative Welfare State Research*. 1–5.
- Ghafur, R. A. (2013). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A. (2001). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: III T Indonesia.
- Muslimin, H. K. (2005). *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Panduan Umum Program Keluarga Harapan*. (2013). Jakarta.
- Plagerson, S., Patel, L., Hochfeld, T., & Ulriksen, M. S. (2019). Social policy in South Africa: Navigating the route to social development. *World Development*, 113, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.019>
- Plante, C. (2019). Policy or window dressing? Exploring the impact of poverty reduction strategies on poverty among the Canadian provinces. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 35(1), 112–136. <https://doi.org/10.1080/21699763.2018.1549090>
- Pryce, J. (2018). *A case study in public child welfare: county-level practices that address racial disparity in foster care placement*.
- Purwanto, E. A. (2016). *Implementasi Kebijakan, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Samoedra, W. (2009). *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudjana, N. (2001). *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zaman, A. (2019). *Transformation of Human Behavior as a Central Strategy for Islamic Economics*. 1–22.
- Zhou, Y., Guo, L., & Liu, Y. (2019). Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.024>